

INFOBPJS

KESEHATAN

gustus 2024

INDONESIA

**CAPAI UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
MELALUI PROGRAM JKN**

**RISKI JUNIANSYAH DAN
VEDDIQ LEONARDO
BAWA INDONESIA KE PUNCAK
OLIMPIADE PARIS**

**PROGRAM JKN JAMIN PEMBIAYAAN
LAYANAN PASIEN TUBERKULOSIS**



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BPJS Kes
Penyelenggara



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB **BPJS SATU**

- ✓ Menindaklanjuti dan **menangani pengaduan** peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit.
- ✓ **Berkoordinasi dengan unit terkait di BPJS Kesehatan** jika pengaduan peserta tersebut berkaitan dengan unit terkait. Melakukan **koordinasi rutin** dengan petugas rumah sakit.
- ✓ Melakukan **kunjungan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan (Customer Visit)** baik yang sedang menjalani rawat jalan maupun rawat inap untuk **memastikan peserta mendapatkan pelayanan yang berkualitas** dari rumah sakit.
- ✓ Memonitor setiap hari terkait **informasi update tempat tidur dan jadwal operasi di rumah sakit**, dan memastikan informasi tersebut **benar dan bisa diakses** oleh pasien peserta BPJS Kesehatan.
- ✓ Memastikan pencatatan penanganan pengaduan melalui aplikasi Saluran Informasi Penanganan Pengaduan (SIPP) sekaligus memastikan petugas rumah sakit **dapat menggunakan dan memahami aplikasi SIPP**.
- ✓ Melakukan **Supervisi Bukti, dan Lihat Langsung (SiBLing)** di rumah sakit.

MERAYAKAN

KEMERDEKAAN INDONESIA DENGAN CAKUPAN KESEHATAN SEMESTA

Indonesia patut berbangga sebab menjadi salah satu negara yang tercepat mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC). Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, tidak mudah bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduknya. Namun nyatanya, dalam kurun waktu satu dekade BPJS Kesehatan beroperasi, kini sudah lebih dari 98% penduduk Indonesia terlindungi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kita hanya memerlukan waktu sepuluh tahun, sementara negara-negara lain rata-rata membutuhkan berpuluh-puluh tahun untuk menjamin kesehatan seluruh penduduknya. Jepang menghabiskan 36 tahun untuk mendaftarkan seluruh warganya ke jaminan sosial, Costa Rica memerlukan waktu 48 tahun, Austria 79 tahun, dan Belgia 118 tahun. Bahkan Jerman, negara tertua yang menerapkan mekanisme jaminan kesehatan sosial, memerlukan waktu 127 tahun. Itu pun cakupannya tidak 100% melainkan hanya sekitar 85% total penduduk setempat.

Tercapainya UHC ini mencerminkan komitmen kuat negara dalam memastikan akses kesehatan bagi seluruh warga. Predikat UHC adalah bukti bahwa cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah semakin luas. UHC ini bukan hanya tersirat melalui angka statistik, tetapi juga merupakan wujud konkrit pertanggungjawaban negara dalam memastikan setiap penduduk Indonesia bisa mengakses layanan kesehatan yang memadai.

Mencapai UHC bukan berarti pekerjaan telah selesai. Meskipun cakupan kepesertaan Program JKN sudah melampaui 98% dari total populasi penduduk Indonesia, namun masih ada sekelompok masyarakat yang belum terlindungi Program JKN. Alasannya pun beragam, bisa karena mereka tinggal di daerah terpencil sehingga tidak memiliki akses informasi yang memadai. Bisa juga karena mereka termasuk kelompok masyarakat rentan yang tidak masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena

dianggap mampu, namun kondisi finansialnya ternyata pas-pasan alias hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Di sisi lain, pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan. Ada lebih dari 17.000 pulau yang membentang sepanjang nusantara, dengan kondisi geografis yang tidak serupa. Kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di ibu kota, belum tentu sama dengan di daerah pedesaan, apalagi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Target selanjutnya yang ingin disasar BPJS Kesehatan ialah kesadaran masyarakat untuk sukarela membayar iuran JKN setiap bulan, atau *willingness to pay*. Bukan hanya cakupan kepesertaan yang didongkrak. Tanggung jawab sosial masyarakat untuk menjaga keberlanjutan Program JKN pun perlu ditanamkan di sanubari. Program JKN adalah milik bersama, dari kita untuk kita. Program ini bukan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak, bukan hanya dari BPJS Kesehatan, pemerintah, atau peserta yang memerlukan manfaatnya saja, agar program ini bisa berjalan berkesinambungan.

Semangat kebersamaan inilah yang ingin kita lestarikan, dimulai dengan merangkul pemerintah daerah untuk mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) masing-masing ke dalam Program JKN. Tahun 2024 ini, sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia sukses mewujudkan UHC di wilayahnya. Sebagai bentuk apresiasi, BPJS Kesehatan dan Wakil Presiden RI pun memberikan UHC Awards 2024 pada para pemerintah daerah tersebut.

Bukan hanya pemerintah daerah yang diapresiasi. Dalam kesempatan yang sama, Indonesia juga memperoleh penghargaan dari Presiden International Social Security Association (ISSA) karena berhasil mencapai UHC dalam waktu relatif cepat. Penghargaan ini pun mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang



serius dalam memberikan proteksi bagi penduduknya berupa jaminan kesehatan yang memadai.

Pencapaian UHC ini melengkapi makna kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui Program JKN, rakyat Indonesia merdeka dari kekhawatiran akan biaya berobat yang mahal, sebab sudah ada kepastian penjaminan biaya kesehatannya. Akses pelayanan kesehatan yang layak bisa digapai semua orang yang sudah menjadi peserta JKN. Mari melangkah bersama mewujudkan masa depan Indonesia yang kian cerah, di mana setiap lapisan masyarakat bisa menikmati akses layanan kesehatan yang berkualitas, mudah, cepat, dan tanpa diskriminasi.

**Direktur Utama
Ali Ghufron Mukti**



DAFTAR Isi

INFO BPJS KESEHATAN EDISI 121

06

FOKUS

INDONESIA CAPAI UHC MELALUI PROGRAM JKN

10

BINCANG

PENCAPAIAN UHC INDONESIA PATUT
DIBANGGAKAN

12

MANFAAT

PROGRAM JKN JAMIN PEMBIAYAAN LAYANAN
PASIEIN TUBERKULOSIS

14

PROSEDUR

HADIR DI MAL PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN BPJS KESEHATAN KIAN MUDAH DAN CEPAT

16

TESTIMONI

GOTONG ROYONG MENCAPAI CAKUPAN
KESEHATAN SEMESTA DI INDONESIA

18

YUK SEHAT

KENALI TUBERKULOSIS DAN HINDARI



PENGARAH Ali Ghufroon Mukti **PEMIMPIN UMUM** Irfan Humaidi **PEMIMPIN REDAKSI** Rizzky Anugerah **SEKRETARIAT** Raden Paramita Suciani, Retno Ristiana Haryatie **REDAKTUR** Afriyeni Roza, Asyraf Mursalina, Juliana Ramdhani, Muhammad Chandra Ikhdha Nurrohman, Nopi Hidayat, Rahma Anindita, Rena Octora Pasuria, Sisca Usman **EDITOR KONTEN** Al Hafiz, Diah Ismawardani, Nandana Dwitiya Swastha, Ranggi Larissa Izzati **EDITOR KREATIF** Achmad Hafiz, Arif Budiman, Amin Rahman Hardi, Darusman Tohir **DISTRIBUSI & PERCETAKAN** Agustina Marniawati, Elmira Dwi Berty, KGS Hamdani, Yayak Nugroho **PENGEMBANGAN** Akhmad Tasyrifan, Siswanto

AKHIRNYA INDONESIA RAIH STATUS UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

Pembaca setia Media Info BPJS Kesehatan

Pada usia ke-79, Republik Indonesia mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih predikat *Universal Health Coverage* (UHC). Penghargaan ini menandai pencapaian Indonesia dalam menyediakan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi warganya melalui Program JKN, yang telah berlangsung selama satu dekade. Di samping itu, Indonesia telah mencapai UHC lebih dari 98%, melampaui target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, di mana target kepesertaan JKN pada tahun 2024 sebanyak 98%.

Predikat UHC ini adalah bukti bahwa cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah semakin luas. Pencapaian UHC ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Kesehatan adalah hak setiap warga negara. Melalui Program JKN, harapannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, menciptakan generasi yang lebih sehat, dan mampu bersaing di tingkat global. Predikat UHC yang diraih Indonesia bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga titik awal untuk terus memperbaiki dan memperluas layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kami menyadari, untuk meningkatkan kualitas informasi yang ada dalam media ini kami masih membutuhkan masukan dan kritik dari pembaca sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada pembaca yang budiman, atas atensi dan masukan membangun sehingga diharapkan media ini terus menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan masyarakat serta pembaca sekalian. Selamat beraktivitas.

Redaksi



KANTOR PUSAT BPJS KESEHATAN
Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No.14,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
10510 - Indonesia



20 POTRET JKN

BPJS KESEHATAN MENJANGKAU PULAU
TERTINGGAL

22 CEK FAKTA

PENANGGAPAN *FRAUD* JKN ADALAH TUGAS
BERSAMA

24 INSPIRASI

RISKI JUNIANSYAH DAN VEDDIQ LEONARDO
BAWA INDONESIA KE PUNCAK OLIMPIADE
PARIS

26 TEKNO

MENGENAL *COMMAD CENTER* BPJS
KESEHATAN

28 GAYA HIDUP

HATI-HATI, STRES BISA SEBABKAN INSOMNIA

30 KILAS 6 PERISTIWA

BPJS KESEHATAN RAIH DUA PENGHARGAAN
BERGENSI DI AJANG TOP GRC AWARDS
2024



BERHASIL CAPAI UHC MELALUI PROGRAM JKN



Sejak diluncurkannya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 2014, Indonesia telah mengambil langkah besar menuju tercapainya cakupan kesehatan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC). Cita-cita untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas kini bukan lagi sekadar impian, melainkan sudah menjadi kenyataan.

Per 1 Oktober 2024, jumlah peserta JKN telah mencapai 276.724.450 jiwa, atau setara dengan lebih dari 98% dari total penduduk Indonesia. Capaian ini telah melampaui target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, di mana target kepesertaan JKN pada 2024 sebesar 98%.

Capaian UHC mencerminkan transformasi besar dalam sistem kesehatan Indonesia, di mana JKN telah berhasil menciptakan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan merata, menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Hasil ini tak lepas dari kerja keras BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN yang terus berupaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Berbagai inovasi juga terus dilakukan untuk memudahkan masyarakat mendaftar menjadi peserta JKN dan mengakses pelayanan kesehatan.

Selain itu, keberhasilan ini juga merupakan hasil dari berbagai kebijakan strategis yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Mulai dari alokasi anggaran yang terus ditingkatkan, penguatan infrastruktur kesehatan, hingga edukasi dan sosialisasi yang gencar dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi peserta JKN.

Peran pemerintah daerah juga sangat besar untuk memastikan seluruh warganya terdaftar dalam Program JKN. Ada sebanyak 33 provinsi serta 460 kabupaten/kota yang telah berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan, JKN merupakan salah satu bagian dari skema perlindungan sosial dan strategi pengurangan beban dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Dengan terdaftar ke dalam Program

JKN, masyarakat dapat terhindar dari risiko jatuh ke dalam kemiskinan, sementara bagi yang sudah miskin, program ini mencegah mereka semakin terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah secara konsisten mendukung Program JKN sebagai salah satu program prioritas nasional," tegas Muhadjir Effendy.

Dukungan ini antara lain diwujudkan dengan mengintegrasikan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Program JKN, serta berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui JKN.

Untuk mengoptimalkan implementasi Program JKN yang

Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang ketiga, di mana World Health Organization (WHO) menargetkan UHC dapat dicapai oleh seluruh negara pada 2030. Indonesia patut berbangga karena telah berhasil mencapai target tersebut lebih awal pada tahun ini.

Komitmen Kuat Negara

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan, Indonesia terbilang paling cepat mencapai UHC dalam waktu 10 tahun. Dicapainya UHC ini mencerminkan komitmen kuat negara dalam memastikan akses kesehatan bagi seluruh warga.

"Predikat UHC ini adalah bukti bahwa cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah semakin luas.

pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS). Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapan yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil.

Dari segi pengelolaan dana, pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun. Angka ini melonjak drastis menjadi Rp151,7 triliun pada 2023. Menariknya, kolektibilitas iuran JKN pada 2023 mencapai 98,62%. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia sudah semakin tinggi akan pentingnya membayar iuran JKN secara rutin untuk menjaga keberlanjutan program ini.

Sinergi dan Kolaborasi



Gubernur, Bupati dan Walikota saat mendapatkan penghargaan dalam UHC Awards tahun 2024, di Jakarta (08/08/2024)

mencakup seluruh masyarakat, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang menginstruksikan 30 kementerian/ lembaga untuk mendukung program ini.

Muhadjir juga menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah telah menetapkan target pencapaian UHC melalui kepesertaan Program JKN sebesar 98% dari jumlah penduduk pada 2024.

UHC sendiri merupakan salah satu target dalam *Sustainable*

Pencapaian UHC ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak," kata Ghufron.

Capaian UHC ini tidak hanya berbicara tentang jumlah peserta yang besar, tetapi juga tentang bagaimana Program JKN memastikan akses yang adil dan merata untuk warga Indonesia.

Per 1 Oktober 2024, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Tindakan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Tidak hanya itu, untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga memberikan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga menyampaikan, pencapaian UHC melalui Program JKN tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/ lembaga, dan seluruh pemerintah daerah yang berkomitmen besar dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Namun, Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.

"Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan



tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas, serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” kata Ma'ruf Amin.

Terdapat beberapa hal penting yang menjadi arahan Ma'ruf Amin untuk kelangsungan Program JKN. Pertama, perluas jangkauan kepesertaan hingga 100% dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyosialisasikan manfaat JKN, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.

“Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” tambahnya.

Kedua, Wapres meminta agar menggunakan pendekatan yang lebih efektif dan solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iurannya.

“Evaluasi sistem pembayaran kewajiban iuran yang telah ada, bisa dalam bentuk program restrukturisasi atau pemberian insentif bagi mereka yang lebih awal melunasi kewajiban iurannya,” imbuhnya.

Wapres juga menekankan pentingnya mendorong ketepatan penyaluran subsidi pembayaran agar manfaatnya dapat dirasakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

“Pastikan adanya *monitoring* dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan,” tegasnya.

Wapres menambahkan, pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan juga harus memastikan setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya dan lokasi.

Tantangan Program JKN

Mencapai UHC bukan berarti pekerjaan telah selesai. Meskipun cakupan kepesertaan Program JKN sudah 98,19%, masih ada kurang dari 2% yang belum terdaftar dan harus menjadi fokus utama. Angka ini mungkin tampak kecil, tetapi mencakup jutaan orang, karena berbagai alasan, belum terhubung dengan Program JKN. Mereka bisa berada di daerah terpencil, termasuk kelompok rentan seperti pekerja informal, atau mereka yang tidak memiliki akses informasi yang memadai.

Muhadjir Effendy menyampaikan, pemerataan fasilitas kesehatan hingga saat ini masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Meskipun pencapaian kepesertaan lebih dari 98% dalam Program JKN adalah prestasi yang luar biasa, hal tersebut tidak akan berarti banyak apabila seluruh rakyat Indonesia belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

“Ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab saya sesuai dengan Inpres. Kita harus berusaha keras bagaimana supaya cita-cita kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di sektor pelayanan kesehatan, dapat terwujud,” kata Muhadjir.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menyampaikan, ada tiga dimensi dalam UHC. Dimensi pertama adalah seberapa banyak masyarakat yang terlindungi kesehatannya. Dimensi kedua tak kalah penting, yaitu kemudahan akses dan kualitas layanan kesehatan. Ketika masyarakat membutuhkan layanan medis, mereka harus bisa mendapatkannya dengan mudah, serta dengan standar kualitas yang terjaga. Sedangkan dimensi ketiga adalah bagaimana memastikan akses ke layanan kesehatan ini tidak menimbulkan beban keuangan yang berat bagi masyarakat.

Setelah UHC berhasil dicapai, David mengakui pekerjaan belum selesai. Berbagai strategi sudah mulai dijalankan, salah satunya melalui skema *sharing* iuran kepesertaan Program JKN. Program ini mencerminkan semangat gotong royong dan kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

David mengungkapkan, mayoritas dari peserta JKN merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN yang ditanggung pemerintah pusat. Namun, banyak juga yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Pertanyaan pun muncul, apa bedanya antara yang dibayarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah?

David menyampaikan, seharusnya mereka yang ditanggung Pemda adalah masyarakat yang sedikit lebih mampu dibandingkan penerima PBI APBN. Namun, mengapa mereka tetap mendapatkan bantuan 100% atau gratis? David berpendapat,

Dekade Program JKN-KIS Untuk Negeri Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia

Jakarta, 8 Agustus 2024





Wakil Presiden RI, Menko PMK RI, Dirut BPJS Kesehatan dan Presiden ISSA memberikan penghargaan langsung pada Pemda yang memperoleh status UHC di Jakarta (08/08/2024)

ke depannya mereka juga perlu berkontribusi.

"Kita ingin menysasar di titik *willingness to pay*. Apabila iuran sebesar Rp35.000 per anggota keluarga terasa masih berat, kita bisa menawarkan opsi yang lebih terjangkau, seperti Rp15.000 atau Rp10.000, kemudian sisa pembayaran ditanggung pemda. Dengan cara ini, lebih banyak masyarakat yang akan bergabung, dan ada rasa bangga dalam diri mereka karena turut serta membayar. Prinsip gotong royong juga tetap terjaga. Masyarakat membayar sebagian dan tetap mendapatkan pelayanan yang sama," kata David.

Melalui skema ini, BPJS Kesehatan tak hanya ingin memperluas cakupan kepesertaan, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama di antara masyarakat.

Strategi kedua adalah memastikan semua badan usaha mendaftarkan pekerjanya. Pengawasan dan pemeriksaan makin gencar dilakukan. Pasaunya, masih banyak pekerja formal yang belum didaftarkan sebagai peserta JKN.

Dari sisi pelayanan, perbaikan juga terus dilakukan. Ghufon menyampaikan, peningkatan jumlah peserta dan iuran membawa tantangan tersendiri. Pada 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk menangani 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastrofik. Menurutya, ini adalah tantangan besar bagi BPJS Kesehatan karena di satu sisi semakin banyak masyarakat

yang tertolong. Namun di sisi lain, BPJS Kesehatan harus mampu mengendalikan biaya pelayanan kesehatan.

Untuk meningkatkan kemudahan akses layanan kesehatan, BPJS Kesehatan juga terus berinovasi, salah satunya melalui Aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur, seperti pendaftaran untuk peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter, pencarian fasilitas kesehatan terdekat, hingga antrean *online*.

Selain itu, terdapat fitur i-Care JKN yang memungkinkan peserta dan dokter melihat riwayat medis, obat-obatan, dan tindakan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Dengan i-Care JKN ini memungkinkan untuk memberikan penanganan lebih cepat dan tepat.

"Predikat UHC yang diraih Indonesia bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga titik awal untuk terus memperbaiki dan memperluas layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ghufon.

UHC Awards 2024

Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan kerja keras pemerintah daerah dalam memastikan seluruh warganya memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, BPJS Kesehatan telah memberikan penghargaan UHC Awards 2024 kepada pemerintah daerah dari 33 provinsi serta 460 kabupaten/kota yang telah berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya.

Bupati Wakatobi, Haliana menyampaikan, pencapaian UHC merupakan bukti nyata dari kolaborasi yang telah terjalin kuat di antara berbagai pihak.

"Tercapainya UHC merupakan wujud nyata dari upaya kita bersama untuk memenuhi hak dasar setiap warga negara dalam memperoleh perlindungan jaminan kesehatan," ujarnya.

Haliana menegaskan, UHC tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya sinergi yang solid antara BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran strategis pemerintah daerah.

Pj Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya menambahkan, satu dekade Program JKN telah memberikan dampak yang luar biasa bagi Indonesia. Karenanya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan program ini.

"Saya berharap Program JKN semakin baik dan berkualitas. Saya mengajak semua pihak untuk mendukung BPJS Kesehatan dalam melaksanakan program ini, demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera," kata Mahendra Jaya.

Bagi Pemda, UHC Awards 2024 merupakan dorongan untuk terus memberikan yang terbaik dalam upaya mewujudkan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warganya, sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mencapai kesuksesan serupa.



PENCAPAIAN UHC

INDONESIA PATUT DIBANGGAKAN



International Social Security Association (ISSA) mengapresiasi Pemerintah Indonesia khususnya BPJS Kesehatan atas capaian *Universal Health Coverage* (UHC) atau Cakupan Semesta Program Jaminan Kesehatan.

**Presiden ISSA
Mohammed Azman**

Dalam satu dekade terakhir, kepesertaan Program JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa atau setara dengan 98,19% dari total penduduk Indonesia. Pencapaian UHC itu melampaui target pemerintah yang diatur dalam Perpres 36/2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024.

Apresiasi ISSA tersebut ditandai dengan penyerahan penghargaan dari Presiden ISSA Mohammed Azman kepada Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di sela-sela kegiatan Penyerahan Penghargaan UHC Awards 2024 di Jakarta, 8 Agustus 2024. Tanggapan Mohammed Azman tentang capaian UHC Indonesia selengkapny disajikan dalam rubrik bincang INFO BPJS edisi kali ini.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap pencapaian UHC di Indonesia ?

Tentunya saya mengucapkan selamat kepada Indonesia atas tonggak pencapaian lebih dari 98% UHC ini. Saya rasa untuk mencapainya dalam waktu 10 tahun adalah suatu hal yang perlu dibanggakan oleh BPJS Kesehatan dan tim. Pencapaian ini sudah melampaui harapan,

dan ini menunjukkan komitmen dan kerja keras BPJS Kesehatan serta pemerintah Indonesia. Dan saya percaya pencapaian ini akan semakin melindungi rakyat dalam skema perlindungan sosial yang dimiliki Indonesia. Ada rintangan signifikan dalam mencapai UHC, seperti bagaimana menjangkau semua populasi, mengelola layanan medis mereka sambil memastikan keberlanjutan finansial JKN.

Apa harapan Anda terhadap Program JKN Indonesia jika dikaitkan dengan tujuan SDGs ?

Salah satu aspek jika kita melihat keseluruhan pendekatan *Sustainable Developments Goals* (SDGs) adalah aspek sosial, yang mana saya yakin bahwa UHC adalah bagian dari perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masa depan umat manusia dan kemanusiaan dalam aspek sosial dan perlindungan sosial.

UHC penting agar semua orang memiliki akses untuk perawatan kesehatan yang berkualitas tanpa adanya hambatan keuangan, dan itu adalah prinsip utama dari misi kita. UHC memastikan setiap individu di suatu negara mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak.

Sebagai Presiden ISSA bagaimana Anda melihat perkembangan Indonesia capai UHC dibandingkan negara-negara lain ?

Seperti yang saya sebutkan bahwa Indonesia mencapai UHC dalam waktu 10 tahun dan ini salah satu tonggak sejarah dan saya melihat ini adalah rekor baru. Dibandingkan dengan negara lain, BPJS Kesehatan lakukan selama 10 tahun, tetapi negara-negara Eropa lainnya membutuhkan waktu sekitar 50 tahun. Jadi ini adalah sesuatu yang kita perlukan, yaitu menjadikan Indonesia sebagai referensi.

Oleh sebab itu sebagai Presiden ISSA saya percaya bahwa BPJS Kesehatan akan berbagi pengalamannya dalam mencapai UHC dalam waktu 10 tahun. Jadi kami menantikan kesempatan BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan ISSA dan berbagi pengalaman dan pencapaiannya, sehingga negara lain pun bisa mencapai UHC dalam jangka waktu yang singkat. Kami menantikan kerja sama ke depannya. Pak Ghufuron Mukti selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan dapat membagikan praktik pelayanan kesehatan ini kepada negara lain.



Presiden ISSA saat memberikan pernyataan kepada awak media dalam kegiatan UHC Awards 2024 di Jakarta (08/08/2024)



PROGRAM JKN JAMIN PEMBIAYAAN LAYANAN PASIEN TUBERKULOSIS



Penyakit tuberkulosis (TB) masih menjadi tantangan kesehatan global yang signifikan, sebab menjangkiti lebih dari 10 juta orang di berbagai belahan dunia hampir setiap tahunnya.

Menurut World Health Organization (Global TB Report, 2023) TB menjadi penyebab kematian tertinggi kedua di dunia setelah COVID-19 pada tahun 2022. Tanpa intervensi pengobatan, risiko kematian akibat TB diperkirakan berkisar 50%. Secara global pada tahun 2022, TB menyebabkan sekitar 1,3 juta kematian. Tapi dengan metode pengobatan yang direkomendasikan WHO, 85% kasusnya bisa disembuhkan. WHO melaporkan jumlah orang yang didiagnosis sakit TB secara global berjumlah 7,5 juta pada tahun 2022.

WHO juga mengklasifikasikan 30 negara dengan beban TB tinggi, sebab menyumbang 87% kasus TB dunia pada 2022 dan dua pertiga dari total global terjadi di delapan negara.

Indonesia menyumbang sekitar 10% kasus TB dunia atau setara lebih dari 724.000 kasus baru sejak 2022, dan jumlahnya meningkat menjadi 809.000 kasus pada 2023. Situasi itu menempatkan Indonesia berada

diperingkat dua penyumbang TB global setelah India yang mencapai 27%.

Berdasarkan catatan BPJS Kesehatan, terdapat total 5.732.457 kasus yang ditangani di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam kurun 2020 hingga 2023 dengan laju kasus per tahun 1,3 juta hingga 1,8 juta pasien. Pemerintah menargetkan Eliminasi TB tahun 2030 melalui penyediaan payung hukum, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang mengamatkan membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) dan Wadah Kemitraan Penanggulangan Tuberkulosis (WKPTB) di tingkat pusat serta membentuk TP2TB di provinsi/kabupaten/kota.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 menargetkan angka kejadian TB menjadi 297 per 100.000 penduduk pada tahun 2024. Sementara, Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC, menargetkan untuk eliminasi TBC pada tahun 2030, dengan penurunan angka kejadian menjadi 65 kasus per 100.000 penduduk dan angka kematian menjadi 6 jiwa per 100.000 penduduk.

Jaminan Program JKN

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah menunjukkan manfaat signifikan bagi para penderita TB di tanah air. Misalnya seperti yang dialami Novi Yuliani (42), seorang ibu rumah tangga dari Desa Merarai Satu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Novi, yang telah menjadi peserta JKN sejak tahun 2020, menceritakan bagaimana program ini membantu pengobatan rutin ibunya yang menderita TB. Menurut Novi, ibunya mengalami sesak dada yang berkepanjangan dan memutuskan untuk mendapatkan perawatan lebih intensif di Rumah Sakit Ade M. Djoen, Sintang. Awalnya, Novi tidak menyangka bahwa sesak dada yang dialami ibunya adalah gejala TBC. Setelah pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit, diagnosis tersebut terkonfirmasi. Dalam situasi yang penuh kekhawatiran tersebut, keberadaan JKN terbukti menjadi penyelamat.

Novi mengungkapkan rasa syukurnya karena program ini menghilangkan kekhawatiran finansial terkait biaya pengobatan yang biasanya sangat tinggi.

"Biaya pengobatan tanpa JKN akan sangat besar. Dengan adanya BPJS Kesehatan, seluruh biaya pengobatan ibu saya dapat ditanggung sepenuhnya," katanya. Ia juga menyebutkan bahwa proses pendaftaran di rumah sakit sangat mudah dan pelayanan medis yang diterima ibunya sangat memuaskan. Keberhasilan JKN dalam mendukung pengobatan TBC keluarga Novi adalah contoh nyata dari manfaat program kesehatan ini bagi masyarakat.

Secara terpisah, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menekankan pentingnya inovasi dalam pembiayaan kesehatan untuk meningkatkan penanganan kasus TB. Langkah-langkah inovatif diperlukan untuk memperkuat sistem pembiayaan kesehatan, dengan fokus untuk memastikan pasien TB mendapatkan perawatan yang tepat waktu dan berkualitas.

"Kami terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan kesehatan, terutama untuk kasus TB, guna memastikan bahwa semua pasien menerima pengobatan yang diperlukan dengan standar terbaik," ujar Ghufron.

Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi angka prevalensi TB dan meningkatkan kualitas hidup pasien di seluruh Indonesia. BPJS Kesehatan menyiapkan beberapa upaya sebagai bentuk dukungan pada program inovasi pembiayaan TB ini di antaranya dengan menyiapkan *dashboard* untuk *monitoring*, membuat sistem *artificial intelligence* (AI) yang mampu membantu kepatuhan minum obat sehingga tidak berhenti minum obat sesuai anjuran.

Selain itu juga akan dibuat sistem informasi kepesertaan bagi pasien TB, melakukan sosialisasi kepada fasilitas kesehatan bersama dengan tim inovasi pembiayaan TB dan Kemenkes serta melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara rutin.

"Komitmen ini kita berikan karena kita ingin Indonesia bebas TB dan *cost*-nya jauh lebih efektif dan tidak menular karena kalau menular produktivitasnya berpengaruh," katanya.

Inovasi pembiayaan kesehatan strategis untuk layanan TB merupakan program intervensi pendanaan yang ditujukan untuk mengubah perilaku FKTP dalam menemukan, melaporkan, dan mengobati TBC sampai tuntas. FKTP yang memenuhi syarat dan ketentuan akan mendapatkan insentif non kapitasi yang pembayarannya dibagi dalam beberapa tahap. Pertama, insentif

tahap diagnosis, yaitu diperuntukkan bagi pasien yang memerlukan pemeriksaan X-ray apabila hasil tes cepat molekuler menunjukkan hasil negatif.

Kedua, pada pengobatan tahap I, yaitu insentif yang diberikan setelah pengobatan intensif selama dua bulan. Ketiga, pengobatan tahap II yang dilakukan pada akhir pengobatan lanjutan.

Beban biaya

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizcky Anugerah memastikan beban biaya penanganan penyakit TB *di-cover* oleh BPJS Kesehatan. Pasien yang ingin mendapatkan obat TB secara gratis harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta Program JKN aktif.

Langkah yang bisa ditempuh pasien, harus mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk pemeriksaan oleh dokter umum. Jika diperlukan, pasien akan dirujuk ke FKRTL untuk penanganan lebih lanjut.

Selama mengikuti prosedur yang berlaku, pasien tidak akan dikenakan biaya untuk pelayanan kesehatan, termasuk obat-obatan, yang dijamin sesuai indikasi medis.

Dalam laporan biaya, Rizcky mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan mencatat 1.841.739 kunjungan terkait TB di FKTP. Di FKRTL, terdapat 2.379.299 kasus Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dengan biaya sebesar Rp517,3 miliar dan 330.832 kasus Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dengan biaya mencapai Rp6,06 triliun.

Rizcky juga menjelaskan dampak ketidakpatuhan dalam pengobatan

tuberkulosis. Pasien yang tidak rutin mengonsumsi obat TB dapat mempengaruhi pembiayaan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

Ketidakpatuhan dalam mengonsumsi obat dapat menyebabkan resistensi, yang mengharuskan pasien menjalani pengobatan lebih lama, hingga 20 bulan. Hal ini berpotensi meningkatkan beban biaya layanan kesehatan yang ditanggung Program JKN.

Untuk mengatasi masalah ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak terkait untuk memastikan pengawasan terpadu terhadap pasien TB.

Baru-baru ini, BPJS Kesehatan meluncurkan inovasi pembiayaan kesehatan strategis tuberkulosis melalui metode pendanaan JKN. Inovasi ini bertujuan untuk memotivasi FKTP dalam mendiagnosis dan mengobati pasien tuberkulosis secara efektif.

Uji coba inovasi ini dilakukan di enam kota besar di Indonesia, termasuk Medan, Bogor, Denpasar, Surabaya, Jakarta Utara, dan Semarang. Program ini juga melibatkan berbagai teknologi seperti sistem kecerdasan buatan untuk memantau kepatuhan pasien dalam pengobatan.

Selain itu, Rizcky juga mengungkapkan bahwa ketersediaan obat TB di fasilitas kesehatan dijamin oleh pemerintah pusat dan daerah. Obat tuberkulosis termasuk dalam tarif kapitasi dan paket INA CBG's yang dibayarkan BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan, sehingga fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik biaya tambahan dari peserta untuk obat dan alat kesehatan.



HADIR DI MAL PELAYANAN PUBLIK

LAYANAN BPJS KESEHATAN KIAN MUDAH DAN CEPAT



Mudah, cepat, setara merupakan slogan yang dipegang teguh oleh BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang menjadi pesertanya. Salah satu bentuk kemudahan dan kecepatan itu diwujudkan dengan menghadirkan layanan BPJS Kesehatan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ada di level kota/kabupaten di Indonesia.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, MPP merupakan pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, juga swasta secara terpadu pada suatu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan,jangkauan, kenyamanan, dan keamanan.

Pertama kali hadir di Banyuwangi pada tahun 2017, kini Indonesia telah memiliki total 206 MPP, per Juni 2024. Tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, MPP kini sudah tersebar ke berbagai wilayah, baik di Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, juga Sulawesi hingga Papua.

Di setiap MPP tersebut, layanan BPJS Kesehatan tak pernah

absen hadir bersama layanan yang diselenggarakan instansi lain. Tak terkecuali di MPP Kota Bekasi yang kini berlokasi di Bekasi Trade Mall Jalan HM. Joyo Martono, Kecamatan Bekasi Timur.

MPP di Kota Bekasi merupakan salah satu yang hadir di awal kemunculan MPP, saat jumlahnya masih hitungan jari di Indonesia. Saat hadir perdana di tahun 2018, MPP Kota Bekasi masih bertempat di Bekasi Junction Jalan Ir. H. Djuanda, Kecamatan Bekasi Timur.

Bahkan sempat hadir pula Gerai Pelayanan Publik yang mengambil tempat di Plasa Cibubur sejak 2019. Baik di MPP Bekasi Junction maupun di GPP Plasa Cibubur, BPJS Kesehatan selalu ambil bagian memberikan layanannya kepada warga pengunjung.

Kini, di MPP Bekasi Trade Mall pun, BPJS Kesehatan tak menyalakan kesempatan memberikan pelayanan langsung kepada warga. Mendapat booth layanan berukuran sekira 3x4 meter, booth BPJS Kesehatan didesain cukup nyaman dengan menghadirkan kursi-kursi untuk pengunjung yang menunggu antrian dilayani.

"Ada momen-momen tertentu booth kami cukup diminati pengunjung," ucap Margareta Anindia Sukma, karyawan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Kota yang kala itu bertugas di MPP Bekasi Trade Mall.

Momen dimaksud biasanya hadir di awal bulan, di mana banyak karyawan pabrik yang tidak diperpanjang masa kerjanya oleh perusahaan. Mereka pun lantas datang ke booth BPJS Kesehatan di MPP untuk mengurus peralihan sistem kepesertaan, dari semula Pekerja Penerima Upah (PPU) menjadi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU).

Selain pengajuan peralihan sistem kepesertaan, layanan lain yang juga bisa diakses pengunjung MPP di booth BPJS Kesehatan ialah pengajuan daftar baru, *update* data, perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama, *update* Mobile JKN, pengajuan Program REHAB, dan lainnya.

"Pada dasarnya semua layanan yang biasanya diberikan di kantor cabang bisa juga diakses di MPP. Sebab pada dasarnya MPP ini merupakan perpanjangan kantor cabang yang lokasinya dihadirkan lebih dekat ke

warga," ucapnya.

Berbeda dengan kantor cabang yang biasanya diserbu peserta atau masyarakat umum sehingga kerap muncul antrean panjang, hal demikian jarang terjadi jika mengakses layanan di MPP. Kalaupun ada antrean, jumlahnya tidak terlalu banyak dan sudah terkoordinir melalui sistem antrean online yang bisa diakses di laman resmi MPP Kota Bekasi.

Selain bisa memberikan layanan seperti halnya yang dapat dilakukan di Kantor Cabang, layanan pada *booth* BPJS Kesehatan di MPP juga pada dasarnya bisa diakses secara *online*, baik melalui Aplikasi Mobile JKN dan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 0811 8 165 165.

"Tapi memang ada beberapa layanan yang tidak bisa diakses *online*, sehingga harus datang langsung ke kantor cabang atau juga ke MPP. Misalnya saja rekon tagihan, karena harus dikoordinasikan dengan bagian keuangan dan lainnya," ucapnya.

Margareta menambahkan, sambil melakukan pendaftaran *online* melalui laman resmi MPP Kota Bekasi, warga juga bisa melihat jenis-jenis layanan apa saja yang bisa diakses di *booth* BPJS Kesehatan. Tidak cuma jenis layanan yang bisa dilihat terlebih dahulu, rangkaian persyaratan yang perlu dibawa untuk tiap-tiap pengurusan yang dibutuhkan pun sudah dirinci secara mendetail di laman tersebut.

"Umumnya yang harus dibawa itu KTP dan kartu keluarga. Syarat lainnya, bergantung pada jenis layanan yang akan diakses. Semisal peralihan kepesertaan dari Pekerja Penerima Upah menjadi peserta mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah itu memerlukan bukti berupa keterangan sudah tidak bekerja yang diterbitkan perusahaan," katanya.

Lebih lanjut Margareta mengatakan, meski merupakan MPP yang didirikan oleh Pemerintah Kota Bekasi, tapi layanan di *booth* BPJS Kesehatan bisa diakses secara umum, tidak terbatas hanya bagi warga ber-KTP Kota Bekasi saja.

Demi pertimbangan kemudahan dan kecepatan juga, Noval Nurul Hadi asal Kecamatan Bekasi Barat rela menempuh perjalanan belasan kilometer dari rumahnya untuk mengakses MPP Bekasi Trade Mall. Perjalanan belasan kilometer itu ditempuhnya untuk sekadar memperbarui data nomor teleponnya yang aktif di sistem kepesertaan JKN.

Huda lebih memilih mendatangi MPP Bekasi Trade Mall alih-



alih mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Kota yang sebenarnya lebih dekat dari tempat tinggalnya, semata-mata demi alasan kecepatan.

"Kalau ke kantor cabang, bisa-bisa harus mengantre karena lebih banyak yang datang mengakses layanan ke sana. Kalau di MPP ini, nyaris tidak antre, begitu sampai sudah langsung dilayani, sehingga lebih cepat pengurusannya," ucapnya.

Meski mengetahui, kebutuhan layanannya juga sebenarnya bisa diakses secara *online* dengan menghubungi bantuan operator *care center*, Huda tetap memilih datang ke MPP sebagai opsi yang paling praktis, efisien, juga efektif.

"Menghubungi *care center* tentu pakai pulsa, takutnya habis banyak karena tidak terkontrol lama pembicaraannya. Jadi lebih baik datang langsung, lebih puas juga karena bisa menanyakan hal lain," ucap Huda yang juga memanfaatkan kunjungannya kali ini untuk meng-*update* status kepesertaan sang adik di Aplikasi Mobile JKN.

Lain Huda, lain pula cerita Fitri, warga Kecamatan Bekasi Timur yang memanfaatkan kunjungannya ke MPP Bekasi Trade Mall untuk sekaligus mampir ke *booth* BPJS Kesehatan. Setelah mengakses layanan yang disediakan instansi lain di MPP Bekasi Trade Mall, Fitri menghampiri *booth* BPJS Kesehatan untuk menanyakan persyaratan pengurusan peralihan menjadi peserta penerima bantuan iuran. Sebagai pekerja *freelance* yang tak menentu besaran dan waktu menerima upah, Fitri khawatir iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan jalur mandiri bisa terhenti sewaktu-waktu karena menunggak.

"Takutnya kalau sedang menunggak, ternyata sakit, tidak bisa pakai JKN BPJS, bisa lebih besar biaya berobat yang harus disiapkan. Jadi saya sedang cari tahu cara pindah jadi peserta PBI," ucapnya.

Setelah mendapatkan informasi lengkap dari petugas yang berjaga di *booth* BPJS Kesehatan, Fitri pun bergegas bertolak menuju Kantor Dinas Sosial untuk mengurus persyaratan yang diperlukan.



GOTONG ROYONG

MENCAPAI CAKUPAN KESEHATAN SEMESTA DI INDONESIA



Sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota menerima penghargaan *Universal Health Coverage (UHC)* Awards 2024 dari BPJS Kesehatan. Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah berhasil mencapai target cakupan kesehatan semesta melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

UHC Awards 2024 juga merupakan bentuk pengakuan atas keseriusan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota dalam memastikan seluruh penduduk di daerah mereka terdaftar dan memiliki akses ke layanan kesehatan yang dijamin dalam Program JKN.

Salah satu daerah yang meraih penghargaan UHC Awards 2024 adalah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY). Bahkan cakupan peserta Program JKN di Provinsi DIY telah mencapai 100%.

Bagi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, penghargaan UHC Awards 2024 bukan sekadar simbol keberhasilan, melainkan sebagai motivasi untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

"Saya punya harapan, tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk teman-teman gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Kita harus bangga bahwa kita semua memiliki komitmen untuk memfasilitasi masyarakat di masing-masing daerah agar dapat hidup lebih layak, khususnya dalam bidang kesehatan," ujar Sri Sultan.

Menurutnya, penghargaan UHC Awards 2024 merupakan pengingat bahwa tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat tidak boleh berhenti. Dengan capaian kepesertaan yang maksimal, berarti masyarakat memiliki kejelasan akses terhadap pelayanan kesehatan.

"Harapan saya, penghargaan ini menjadi motivasi, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat. Semua daerah harus bisa mencapai 100% UHC, yang berarti rakyatnya difasilitasi oleh para pemimpinnya untuk hidup lebih sejahtera dan sehat," lanjutnya.

Sri Sultan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan. Tidak hanya di fasilitas kesehatan, tetapi juga dalam

organisasi BPJS Kesehatan sendiri. Ia berharap BPJS Kesehatan dapat terus memperbaiki layanannya, terutama dalam memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda di seluruh daerah.

"Saya juga berharap BPJS Kesehatan memperhatikan aspek kultur masyarakat yang berbeda-beda dalam pola pendekatan dan komunikasinya. Ini sangat penting agar pelayanan bisa semakin baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya.

Tidak Cepat Berpuas Diri

Kota Padang Panjang juga termasuk daerah yang meraih UHC Awards 2024. Di balik pencapaian tersebut, ada strategi yang terus dijalankan.

Pj Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra menyampaikan, untuk memastikan seluruh masyarakat terus terlindungi dengan jaminan kesehatan di masa depan, pihaknya menerapkan berbagai strategi dan inisiatif melalui penguatan infrastruktur kesehatan, peningkatan fasilitas medis, hingga optimalisasi sistem informasi kesehatan. Semua dilakukan demi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

Baginya, penghargaan UHC Awards 2024 bukanlah akhir dari usaha, melainkan batu loncatan untuk terus mengupayakan yang terbaik bagi warga Kota Padang Panjang.

"Tentu kita tidak boleh cepat berpuas diri. Selalu ada ruang untuk

melakukan perbaikan," ujarnya dengan nada yang penuh semangat.

Sementara itu, di ujung timur Indonesia, Papua Barat juga berdiri tegak sebagai simbol keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan melalui kesehatan dengan meraih UHC Awards 2024.

Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere dengan penuh kebanggaan menyampaikan pandangannya tentang arti penting Program JKN dan UHC Awards 2024. Menurutnya, kehadiran negara adalah untuk mewujudkan warga yang sejahtera.

"Warga negara yang sejahtera itu salah satu ukurannya adalah kesehatan mereka benar-benar terjaga dan terlindungi," ujarnya dengan penuh keyakinan.

Bagi Ali Baham, kesehatan adalah pondasi dari kesejahteraan, dan Provinsi Papua Barat telah membuktikan bahwa mereka mampu membangun pondasi tersebut dengan baik.

Ali Baham juga mengimbau seluruh masyarakat di penjuru negeri untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang ada tanpa rasa khawatir akan beban biaya. Menurutnya, perjalanan satu dekade Program JKN telah mengalirkan kebaikan yang menyentuh kehidupan ratusan juta orang. Melalui semangat gotong royong, Program ini memastikan semua orang dapat tertolong dan mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak.



Gubernur Papua Barat
Ali Baham

"Satu dekade Program JKN telah mengalirkan kebaikan. Dengan gotong royong, semua tertolong," ucapnya.

UHC Awards 2024 bukan hanya sekadar penghargaan. Ini adalah cerita tentang komitmen, kerja keras, dan harapan yang dirajut bersama oleh berbagai pihak baik pusat maupun daerah. Melalui penghargaan ini, kita melihat bagaimana kesehatan menjadi prioritas, bagaimana kesejahteraan menjadi tujuan bersama, dan bagaimana seluruh bangsa ini bergerak menuju masa depan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera.



KENALI TUBERKULOSIS DAN HINDARI



Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit kronis yang menular dan mematikan, dengan angka kematian 17 orang per jam. Berdasarkan laporan Global TB Report 2023, Indonesia menjadi negara kedua tertinggi kasus TB setelah India dengan estimasi sebanyak 1.060.000 kasus dan angka kematian 134.000 per tahun.

Kementerian Kesehatan mencatat kasus TB pada periode tersebut meningkat hingga 77 persen atau setara 820.789 kasus. Sebanyak 134.528 kasus di antaranya dideteksi pada kelompok anak.

Jumlah tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kasus serupa yang terjadi sebelum pandemi COVID-19 dengan rata-rata penemuannya di bawah 600.000 kasus per tahun.

Deteksi TB mirip dengan deteksi COVID-19, yakni jika tidak dites, dideteksi, dan dilaporkan maka angkanya terlihat rendah sehingga terjadi *under reporting*, yang mengakibatkan pengidap TB berkeliranan dan berpotensi menularkan satu sama lain, karena tidak diobati.

Untuk melindungi diri dan orang sekitar dari TB, penting bagi masyarakat untuk menerapkan

langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Dokter dari Rumah Sakit Fatmawati, Livya Holiwono menyebutkan bahwa TB adalah penyakit yang dibawa oleh bakteri *Mycobacterium Tuberculosis* yang menular lewat udara, kemudian terhirup melalui hidung dan mulut, sebelum akhirnya ke paru-paru. Setelah bakteri tersebut dimakan oleh sel darah putih, kata Livya, ada tiga kemungkinan pengaruh yang terjadi pada metabolisme tubuh.

Pertama, apabila daya tahan tubuhnya bagus, maka bakteri tersebut mati. Untuk itu, upaya meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara berolahraga serta makan makanan yang bergizi merupakan pola yang perlu diperhatikan untuk menghindari TB. Ia mengatakan makanan yang dapat dikonsumsi berupa buah, sayur, lauk yang mengandung cukup karbohidrat dan protein. Selain itu, juga perlu menghindari rokok.

Daya tahan tubuh menjadi bagus manakala sistem kekebalan tubuh ditopang dengan pola makan sehat, cukup tidur, dan olahraga teratur. Imunitas yang baik dapat membantu melawan infeksi TB, kata Livya. Menjaga pola makan yang cukup adalah kunci utama untuk kesehatan optimal. Ia menjelaskan bahwa pola

makan yang seimbang dan cukup tidak hanya memberikan energi yang diperlukan tubuh tetapi juga mendukung fungsi organ, kekebalan tubuh, dan kesehatan secara keseluruhan.

Pola makan yang cukup mencakup konsumsi berbagai jenis makanan yang kaya nutrisi, seperti sayuran, buah-buahan, protein, dan karbohidrat kompleks. Makanan ini membantu memenuhi kebutuhan tubuh terhadap vitamin, mineral, dan serat, yang penting untuk pencernaan dan metabolisme. Selain itu, penting untuk menjaga porsi makan agar tidak berlebihan, serta memperhatikan waktu makan agar tubuh dapat memproses makanan dengan efektif.

Livya mengatakan, terdapat kemungkinan kedua bilamana bakteri TB tersebut hidup dorman di dalam tubuh, yang selanjutnya disebut sebagai TB laten yang tanpa gejala spesifik pada penderita.

TB laten merupakan kondisi di mana sistem pertahanan tubuh tidak mampu mengeliminasi kuman TB secara sempurna, namun sistem pertahanan tubuh mampu mengontrol sehingga kuman yang menginfeksi seperti tidur, dan bisa bangkit kembali saat daya tahan tubuh melemah.

Situasi itu umumnya dialami oleh kelompok berisiko tinggi, seperti petugas kesehatan atau orang-orang di rumah yang melakukan kontak erat dengan pasien TB serta penghuni rumah yang sama, terutama jika ada pasien yang melakukan cuci darah secara rutin, penderita diabetes, serta anak dengan usia di bawah lima tahun. Orang-orang berisiko tersebut, kata dia, diketahui melalui investigasi kontak yang dilakukan pada saat berobat.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TB untuk memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat, guna menjalani pemeriksaan tuberkulin, untuk mengetahui adanya TB laten dalam tubuh, agar bisa segera ditangani.

Pengaruh ketiga dari bakteri tersebut dalam sistem metabolisme tubuh, kata Livya, adalah sistem kekebalan tubuh tidak mampu melawan bakterinya, sehingga bisa berkembang biak dalam tubuh dan menyebabkan sakit TB.



 **Dokter Rumah Sakit Fatmawati**
Livya Holiwono

TB secara umum menyerang organ paru-paru, namun penyakit ini bisa menyerang organ tubuh lainnya, misalnya *nodus limfa*, *pleura*, serta area *osteartikular*.

Penyebaran hematogen seringkali terjadi secara samar, sehingga tidak menimbulkan gejala klinis. Organ-organ yang mudah terinfeksi oleh *Mycobacterium* adalah sumsum tulang, hati, dan limpa.

Bakteri yang sudah menyebar ke aliran darah kemudian dideposit ke bagian atas otak, tulang, ginjal, serta paru, di mana keadaan organ itu sangatlah mendukung perkembangan *Mycobacterium Tuberculosis*.



Vaksin dan Gaya Hidup

Livya mengatakan bahwa tubuh juga perlu mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup sebagai bentuk pencegahan, misalnya pada pagi hari, jendela perlu dibuka agar ada pertukaran udara dan sinar matahari dapat masuk.

"Kemudian kasur, agar kasurnya *nggak* lembab, rutin dijemur," katanya.

Ia menekankan olahraga yang teratur, misalnya seminggu tiga kali, juga penting guna membangun daya tahan tubuh.

Dia juga mengingatkan untuk memberikan bayi-bayi yang berusia kurang dari tiga bulan Vaksin *Bacillus Calmette-Guérin* (BCG). Vaksin itu bertujuan memberikan perlindungan terhadap TB.

Meski efektivitasnya bervariasi pada tiap orang, kata dia, vaksin itu sangat bermanfaat untuk mencegah TB berat, seperti TB miliar atau TB meningitis. Vaksin BCG dapat memberikan perlindungan awal terhadap tuberkulosis, terutama untuk anak-anak di daerah dengan prevalensi tinggi TB.

Bagi penderita tuberkulosis, lanjutnya, perlu memakai masker atau menutup mulut saat batuk memakai tisu atau siku, dan membuang tisu tersebut di tempat sampah dan tidak sembarangan.

"Terus setelah itu, pastikan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun," katanya.

Hal yang juga penting diperhatikan adalah kebersihan lingkungan. Pastikan ventilasi yang baik di rumah dan tempat kerja. Udara segar membantu mengurangi risiko penularan TB, karena bakteri penyebab TB menyebar melalui udara.

Selain itu, masyarakat juga perlu menghindari kontak dengan penderita TB aktif, khususnya jika berada di lingkungan di mana ada kasus TB aktif, gunakan masker dan pastikan penderita mendapatkan perawatan medis yang tepat. Masyarakat juga perlu rajin memeriksakan kesehatan. Jika mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, penurunan berat badan yang tidak jelas, atau keringat malam, segera konsultasikan ke dokter untuk pemeriksaan dan diagnosis dini.

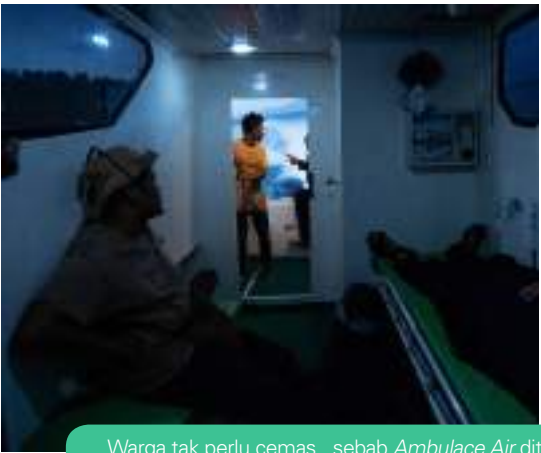


BPJS KESEHATAN MENJANGKAU PULAU TERLUAR

Oleh : Ahmad Mufti - Masakini.co



Butuh waktu 90 menit dari pelabuhan Ulee Lheu di ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh untuk menuju Pulo Aceh di Aceh Besar. Kecamatan gugusan Pulau itu, masuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Gugusan pulau yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah timur, itu memiliki luas 90,56 Km. Kantor camat setempat mencatat, per 17 Agustus 2023 jumlah penduduk 4.767 jiwa.



Warga tak perlu cemas , sebab *Ambulance Air* ditanggung BPJS Kesehatan. KM Lamuri gratis untuk antar pasien ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

*) Pemenang *Photo Story* Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan Tahun 2023



2 November 2014, Presiden Jokowi meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) -Kartu Indonesia Sehat (KIS). Lima tahun berselang, di Pulo Aceh masih tercatat 700 jiwa belum terakses jaminan Kesehatan. Tapi BPJS Kesehatan pada Tahun 2019 mengirim petugas untuk menekan angka tersebut. Hingga tahun 2023 jumlah kepesertaan JKN bagi masyarakat Kecamatan Pulo Aceh sebanyak 4.579 jiwa dari total penduduk 4.767 jiwa, artinya tersisa 188 jiwa masyarakat Pulo Aceh yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan.



Selain menanggung biaya pengobatan penyakit berat hingga ringan, ambulans, bahkan berbagai inovasi BPJS Kesehatan sangat membantu warga di pulau tertinggal. Terpenting, aktivitas Puskesmas Pulo Aceh berjalan lancar.

PENANGANAN FRAUD JKN

ADALAH TUGAS BERSAMA



Sejak beroperasi 1 Januari 2014 pelaksanaan Program JKN masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah potensi kecurangan (*fraud*). *Fraud* adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari Program JKN melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Fraud* bisa dilakukan oleh pegawai BPJS Kesehatan, peserta, fasilitas kesehatan (faskes) dan penyedia obat serta alat kesehatan maupun pemangku kepentingan lainnya.

Khusus di rumah sakit, potensi *fraud* yang kaitannya dengan klaim layanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan bisa terjadi misalnya melalui penulisan kode diagnosis yang berlebihan (*upcoding*), penjiplakan klaim dari pasien lain (*cloning*),

klaim palsu (*phantom billing*), penggelembungan, tagihan obat dan alkes (*inflated bills*), pemecahan episode pelayanan, rujukan semu, tagihan berulang, memperpanjang lama perawatan, dan lainnya.

Konsekuensi *fraud* tersebut bisa berdampak panjang. Bisa menyebabkan jumlah klaim layanan menjadi semakin besar sehingga bisa berdampak pada defisit pembiayaan. BPJS Kesehatan akan membayar klaim yang seharusnya tidak dibayar. Kelebihan pembayaran karena praktik *fraud* akan mengganggu *cash flow* Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan. Apabila defisit pembiayaan JKN terjadi maka klaim layanan faskes ke BPJS Kesehatan akan terganggu. Dengan klaim layanan terganggu maka hal ini akan mengganggu *cash flow* rumah sakit.

Diketahui, total biaya pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKRTL selama program ini dilaksanakan sangat besar. Sejak 2014 sampai 2023 saja telah dibayarkan Rp912 triliun kepada faskes. Sepanjang 2023 total pemanfaatan Program JKN oleh peserta untuk mendapat pelayanan kesehatan mencapai kurang lebih 606,7 juta pemanfaatan, yang artinya per hari kalender mencapai 1,7 juta pemanfaatan.

Dengan besarnya pembiayaan yang telah dikeluarkan tersebut, semua pihak harus menyadari akan adanya potensi kecurangan layanan JKN, dan bersama-sama mengatasinya agar pembiayaan yang besar ini dapat dimanfaatkan oleh orang yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, JKN telah terbukti meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan



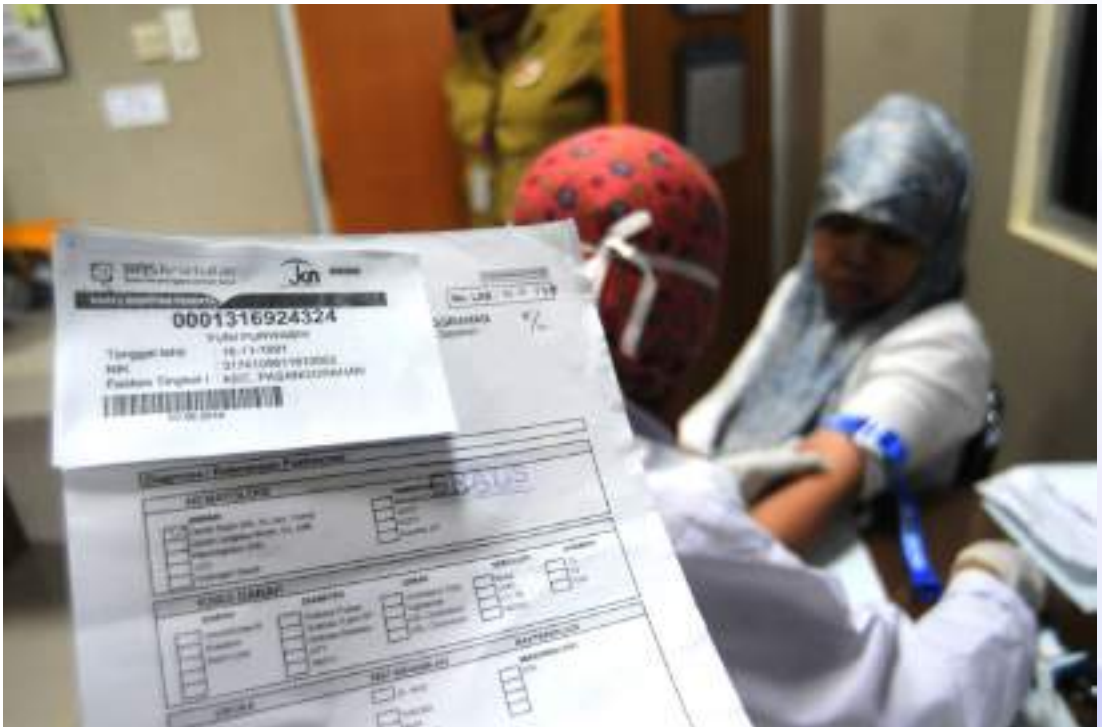
meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan formal, melindungi masyarakat dari pengeluaran kesehatan besar dan kemiskinan. Karenanya diperlukan dukungan kuat dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Mencegah *fraud* adalah tugas bersama demi masyarakat Indonesia yang lebih sehat.

Pencegahan terhadap *fraud* dalam JKN ini sangat penting dilakukan karena dia bagaikan fenomena gunung es, dan susah

untuk dibuktikan lantaran harus meliputi unsur kesalahpahaman atau penipuan yang disengaja dan keuntungan yang tidak sah atau secara tidak wajar. Menurut data OECD, rata-rata kerugian karena *fraud* dan *error* mencapai lebih dari 6% dari total biaya pelayanan kesehatan. WHO memperkirakan kerugian yang disebabkan oleh *fraud* mencapai 0,6% hingga 15% dari total biaya pelayanan kesehatan. National Health Care Anti Fraud Association (NHCAA) memperkirakan total kerugian karena *fraud* mencapai 10%.

Berbagai upaya penanganan *fraud* sudah dikembangkan, mulai dari menerbitkan regulasi, membentuk tim penanganan kecurangan (Tim PK) JKN atau tim *antifraud*, mengembangkan berbagai *tools* penanganan *fraud* dan sosialisasi. Terkait *tools* deteksi kecurangan, BPJS Kesehatan mengembangkan sistem pencegahan kecurangan dalam manajemen klaim dengan mengembangkan *collaborative intelligence*, yaitu kolaborasi antara aspek *people* (verifikator) dengan aspek *machine*/teknologi atau *artificial intelligence* (AI). Ini untuk meningkatkan kinerja pencegahan dan penanganan *fraud* yang berfokus pada data anomali dalam aliran transaksi *big data* klaim layanan dari faskes.

BPJS juga membuat berbagai langkah penanganan *fraud*. Di antaranya, membentuk unit khusus dalam struktur organisasi BPJS yang berfungsi untuk mengembangkan dan mengoordinasikan langkah-langkah *antifraud*. Membentuk Tim PK Antifraud di semua jenjang organisasi dari pusat sampai ke daerah, yang berjumlah 1.947 orang. Juga telah dikembangkan dan diimplementasikan sejumlah aplikasi untuk menganalisis *big data* yang dikelola BPJS. Menetapkan *key performance indicator* (KPI) bagi unit dan Duta BPJS Kesehatan terkait dengan kegiatan *antifraud*.



A full-page background image of a male weightlifter, Rizki Juniansyah, in a red and white singlet, lifting a barbell with yellow and blue Eleiko weights. The barbell has 'ELEIKO' and 'Paris 2024' printed on it. The lifter is looking upwards with a focused expression.

Rizki Juniansyah & Veddriq Leonardo

BAWA INDONESIA KE PUNCAK OLIMPIADE PARIS

Saat mata dunia tertuju pada Olimpiade Paris 2024, ada dua nama dari Indonesia yang berhasil mencuri perhatian, yaitu Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah. Mereka dijuluki Spiderman dan Hulk Indonesia se usai meraih medali emas Olimpiade Paris 2024, sebuah pencapaian yang bukan hanya membanggakan Indonesia, tetapi juga menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

Kemenangan Veddriq dan Rizki juga dirayakan dengan meriah saat keduanya tiba di Indonesia. Ketika acara arak-arakan atlet peraih medali Olimpiade Paris 2024 dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menuju Istana Negara, Veddriq menggambarkan kemenangannya di Olimpiade Paris 2024 sebagai hasil dari perjalanan panjang dan penuh pengorbanan. Baginya, medali emas yang diraih bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang semua orang yang mendukungnya sejak awal.

Kemenangannya di Olimpiade Paris 2024 juga bukanlah akhir, melainkan awal dari tekad baru untuk terus meningkatkan kualitas dan persiapan menghadapi kompetisi-kompetisi mendatang. Veddriq ingin terus mendorong batas kemampuannya dan menunjukkan bahwa ia bisa.

"Kita perlu terus meningkatkan kualitas dan persiapan karena saingan kita juga akan terus bekerja keras. Mereka akan menunjukkan kalau mereka tidak akan tinggal diam, dan kita harus siap menghadapi kompetisi yang semakin ketat," kata Veddriq.

Dari Tanah Borneo ke Panggung Dunia

Perjalanan Veddriq menuju kejayaan Olimpiade Paris 2024 tidaklah mudah. Lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, 11 Maret 1997, Veddriq tumbuh dengan kecintaan terhadap olahraga yang berbeda dari kebanyakan anak-anak seusianya, yaitu *sport climbing*.

Veddriq pertama kali mengenal dunia panjat tebing saat duduk di bangku kelas 1 SMU dari kelompok pecinta alam di sekolah. Meskipun pada awalnya panjat tebing tidak begitu populer di lingkungannya, Veddriq melihat olahraga ini sebagai sesuatu yang menantang dan keren.

Ketertarikan ini berkembang seiring waktu. Dengan dukungan penuh dari keluarganya, Veddriq mulai mengikuti berbagai kompetisi, mulai dari tingkat daerah hingga nasional.

Debutnya di tingkat nasional dimulai pada Kejuaraan Nasional Junior di Kepulauan Riau pada 2014. Meskipun gagal meraih medali dan hanya menembus 8 besar kategori Speed World Record, pengalaman itu menjadi titik balik yang memperkuat tekadnya.

Dua tahun kemudian, pada Kejuaraan Nasional Junior 2016 di Bangka Belitung, Veddriq meraih medali perunggu pada kategori Speed Perorangan Putra, sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa ia telah menemukan jalannya.

Pada 2018, Veddriq mulai berkompetisi di kejuaraan internasional yang digelar di Moskow. Dalam debutnya itu, ia berhasil meraih medali perunggu kategori Speed Perorangan Putra. Pada akhirnya, kerja keras dan dedikasi Veddriq membuahkan hasil di Paris. Di tengah sorak-sorai penonton, Veddriq berdiri di puncak podium dengan medali emas di lehernya mengalahkan atlet-atlet terbaik dunia. Dia menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 4,75 detik.

Emas Pertama dari Angkat Besi

Kebanggaan yang sama juga disampaikan Rizki Juniansyah, peraih medali emas dalam cabang angkat besi kelas 73 kilogram putra. Prestasi ini bukan hanya membanggakan dirinya, tetapi juga menjadi tonggak bersejarah bagi Indonesia. Sebelumnya, cabang angkat besi Indonesia hanya mampu meraih medali perak dan perunggu di ajang Olimpiade.

"Ini adalah medali pertama saya di Olimpiade dan medali emas pertama untuk angkat besi setelah sekian lama. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur," ujar Rizki yang dahulu bercita-cita menjadi pembalap motocross.

Rizki lahir pada 17 Juni 2003 di Serang, Banten. Sejak kecil, dunia angkat besi sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Minat ini bukan datang begitu saja, melainkan sudah mengakar dalam keluarganya yang memang bergelut di dunia angkat besi.

Sejak usia 11 tahun ketika masih duduk di kelas 4 SD, Rizki mulai serius menekuni angkat besi. Di bawah bimbingan ayahnya, Rizki menjalani program latihan yang intens dan disiplin, membentuk fondasi kuat bagi kariernya di masa depan.

Pada 2015 ketika menginjak kelas 6 SD, Rizki sudah terpilih untuk masuk ke pemusatan latihan bagi pelajar, sebuah langkah awal yang mempertegas keseriusannya dalam dunia angkat besi. Namun, jalan yang dilalui Rizki bukan tanpa pengorbanan. Demi meraih impiannya, ia harus rela meninggalkan berbagai hobi yang ia cintai, termasuk motor *trail*. Waktu bermain bersama teman juga harus dikorbankan.

Perjuangan dan pengorbanan Rizki terbayar tuntas. Prestasi demi prestasi berhasil ditorehkan. Pada 2024 dalam Kejuaraan Dunia Angkat Besi di Thailand, ia mencetak rekor dunia dengan meraih dua medali emas dan satu medali



Atlet Sport Climbing Indonesia
Veddriq Leonardo

perak. Pencapaian ini memperkuat posisinya sebagai salah satu atlet angkat besi terbaik di dunia.

Di Paris, Rizki menunjukkan kekuatan dan ketangguhannya yang luar biasa. Dengan teknik yang sempurna dan mental yang kokoh, ia berhasil mengangkat beban yang tak tertandingi oleh para pesaingnya dengan total angkatan 354 kilogram.

Meskipun telah meraih puncak prestasi dengan memenangkan medali emas Olimpiade Paris 2024, Rizki tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Pemuda yang tumbuh dan ditempa di Sasana Bulldog Gym di Kota Serang, Banten, ini tetap ingat pada tempat yang telah membentuknya menjadi atlet kelas dunia.

Rizki merasa kemenangan ini bukan hanya hasil dari kerja kerasnya sendiri, tetapi juga dari dukungan dan fasilitas yang disediakan oleh Sasana Bulldog Gym. Oleh karena itu, sebagian dari bonus yang ia terima dari pemerintah akan didedikasikan untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas gym yang telah menjadi rumah kedua baginya.

"Insyaallah ke depannya saya akan memperbaiki Sasana Bulldog Gym untuk lebih baik lagi, agar nanti saya dan teman-teman bisa berprestasi lagi untuk menyumbangkan medali-medali di ajang lainnya," ucap Rizki.

Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah telah membuktikan, dengan kerja keras, disiplin, dan cinta yang mendalam terhadap olahraga, mimpi sebesar apa pun bisa dicapai.



MENGENAL COMMAND CENTER BPJS KESEHATAN



Pelaksanaan Program JKN kini telah ditunjang dengan infrastruktur digital yang dapat diandalkan dan senantiasa senantiasa memberikan kemudahan akses informasi bagi berbagai pihak. Salah satunya melalui *Command Center* BPJS Kesehatan. Pusat dari sistem manajemen informasi big data ini telah dikunjungi dan mendapat apresiasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya kunjungan delegasi Malaysia dari Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM) Universiti Kebangsaan Malaysia yang dipimpin oleh Timbalan Pengarah (Perubatan) HCTM, Zairul Azwan Mohd Azman. Mereka mempelajari pengelolaan pembiayaan yang efektif di fasilitas kesehatan (faskes) lewat *command center*.

Keterbukaan informasi yang diamanahkan kepada BPJS Kesehatan berupa akses informasi

yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap pemangku kepentingan memang perlu ditunjang dengan sistem informasi teknologi (IT) yang handal. Kehandalan sistem IT akan berdampak langsung terhadap kualitas aplikasi yang digunakan dalam pelayanan kepesertaan, pelayanan kesehatan oleh faskes, sistem manajemen klaim, serta dalam manajemen utilisasi pelayanan kesehatan sekaligus pada mutu pelayanan sesuai kebutuhan peserta akan akses yang cepat atas informasi.

Apalagi BPJS Kesehatan mengelola sejumlah data besar, yaitu lebih dari 276 juta peserta dengan 32 ribu lebih fasilitas kesehatan yang antara lain terdiri dari 23 ribu lebih rumah sakit serta interoperabilitas data dengan 15 kementerian/lembaga dan 955 ribu kanal pembayaran. Jumlah data yang besar ini menjadi poin krusial dalam penyelenggaraan JKN. Untuk

memudahkan pengelolaan data besar tersebut secara *real-time*, dihadirkanlah *command center*, yaitu ruang pemantau dengan sistem informasi terintegrasi yang berfungsi mengontrol data pelayanan JKN di seluruh daerah.

Command center membantu BPJS Kesehatan dalam memantau data peserta, faskes, dan rumah sakit secara *real-time* dan detail. Semua terpantau baik perkembangan peserta, jumlah akses layanan di fasilitas kesehatan, iuran peserta, bahkan proses pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan juga dapat langsung disaksikan di *command center*. Jumlah pemanfaatan data yang berlangsung di dalam ekosistem Program JKN setiap harinya lebih dari 121 juta transaksi data, atau sekitar 1.400 transaksi data per detik. Terdapat lebih dari 500 miliar row data yang meliputi data kepesertaan, pelayanan

kesehatan, dan iuran.

Di *command center* ini juga terdapat sistem *anti fraud* yang digunakan untuk mendeteksi potensi kecurangan dalam pemanfaatan pelayanan JKN. Sistem ini menggunakan *Business Intelligence System* untuk memonitor dan evaluasi atas pelayanan JKN, serta mampu mendukung keputusan strategis manajemen dalam perbaikan pelayanan bagi peserta.

Kesehatan menghadirkan aplikasi sistem manajemen informasi *big data* dalam pengelolaan pelayanan JKN secara lengkap dan *update* melalui otomatisasi proses bisnis, pengembangan interoperabilitas sistem JKN dengan kementerian/ lembaga, peningkatan informasi teknologi *maturity level* dan kepastian ketersediaan sistem informasi teknologi yang handal.

Dengan pengelolaan data yang

keamanan terhadap aplikasi hingga keamanan terhadap data yang dimiliki.

Dengan jumlah peserta yang begitu banyak dan besarnya jumlah faskes yang bekerja sama, maka dengan kecanggihan BPJS Kesehatan ini menjadikan semua elemen di ekosistem JKN untuk terus maju mengikuti perkembangan digital yang ada. Semua hal tersebut untuk menghadirkan pelayanan yang



Aplikasi yang saat ini digunakan dalam kegiatan *utilization review* melalui olah data *Business Intelligence System* antara lain DEFRAIDA (Deteksi *Fraud* dan Analisa Data Klaim), SIMPATIK (Dashboard Verifikasi Pasca Klaim) dan SEMUR (Standar Evaluasi Minimal Utilisasi Review). BPJS

sangat besar, tentu keamanan data yang dibutuhkan semakin tinggi. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan telah menerapkan enam layer proteksi terhadap keamanan data, dimulai dari menentukan parameter keamanan, keamanan jaringan, keamanan *endpoint*, keamanan di elemen manusia,

optimal kepada peserta JKN. Kita tahu bahwa pelayanan JKN sekarang sudah semakin memuaskan dan hal ini perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi. Dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang akan menciptakan kualitas layanan yang semakin memuaskan bagi peserta.



HATI-HATI, STRES BISA SEBABKAN INSOMNIA



Beban hidup, ragam aktivitas hingga perkembangan teknologi membuat masyarakat modern kian lama terjaga. Banyak orang mengalami gangguan tidur atau insomnia. Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders fourth edition (DSM-IV) insomnia adalah suatu kesulitan dalam memulai tidur, mempertahankan tidur, atau tidur yang tidak berkualitas selama satu bulan atau lebih. Seseorang dengan gangguan ini dapat mengalami bangun terlalu dini atau kesulitan untuk tidur kembali.

Riset yang dilakukan US Census Bureau, International Data Base tahun 2010 terhadap penduduk Indonesia menunjukkan, dari 238,452 juta jiwa sebanyak 28,035 juta atau 11,7% terjangkit insomnia. Angka ini membuat insomnia sebagai salah satu gangguan kesehatan paling banyak dikeluhkan masyarakat. Tingginya angka tersebut memiliki kaitan dengan bertambahnya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan, seperti depresi dan kecemasan.

Selain kondisi biologis tubuh, ternyata perasaan stres juga dapat

menyebabkan insomnia. Pada beberapa kasus, seseorang yang mengidap insomnia jangka pendek dapat berlangsung dalam beberapa hari atau minggu. Umumnya pengidap gangguan insomnia akut ini disebabkan oleh perasaan stres. Banyak penelitian menyebutkan seseorang yang stres mempunyai kemungkinan besar mengidap gangguan insomnia. Stres ternyata dapat menginduksi serangkaian reaksi tubuh pada otak dan sistem saraf, sistem endokrin (hormon), hingga sistem kekebalan tubuh.



Psikiater KSM/Departemen Kesehatan Jiwa FKUI/RSCM, dr. Leonardo Alfonsius Paulus Lalenoh, M.Sc, Sp.KJ, menjelaskan, tidur berkaitan dengan regulasi salah satu senyawa di otak, yaitu melatonin. Melatonin berperan penting dalam pola tidur (ritme sirkadian) seseorang dan juga merupakan komponen yang sangat terpengaruh saat seseorang mengalami suatu kondisi stres.

“Kondisi stres akan mengaktifkan sistem saraf simpatis di otak yang menimbulkan berbagai manifestasi gejala yang terlihat sebagai kondisi kecemasan,” ujar Leonardo kepada Media Info BPJS Kesehatan di Jakarta, baru-baru ini.

Kondisi yang berlangsung secara terus menerus (kronis) lambat laun akan memengaruhi berbagai sistem yang terlibat di dalam otak, salah satunya pada fungsi melatonin. Studi-studi menunjukkan bahwa secara struktur biologis, melatonin memiliki efek untuk meredakan kecemasan seseorang. Akan tetapi jika kondisi stres tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka mekanisme kompensasi ini tidak lagi adekuat. Sebagai akibatnya, kondisi kecemasan akibat stres akan menetap dan pola tidur juga ikut terganggu.

“Itulah sebabnya, keluhan utama

yang disampaikan seseorang yang mengalami kecemasan adalah perubahan pola tidur,” kata Leonardo.

Lalu, bagaimana cara mengatasi insomnia akibat stres dan meningkatkan kualitas tidur? Insomnia yang terjadi berhubungan dengan perasaan stres dapat dicegah dan dikelola dengan merubah kebiasaan sehari-hari. Penting untuk mengatur gaya hidup sehari-hari agar tubuh lebih sehat secara mental dan fisik. Dengan begitu, pikiran akan menjadi lebih positif dan perasaan stres akan berkurang yang membuat insomnia dapat diatasi.

Menurut Leonardo, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas tidur adalah dengan mengoptimalkan kinerja dari melatonin.

“Kerja melatonin akan optimal dengan mengatur pola makan yang sehat dan tentunya memberikan situasi yang berpadanan dengan kerja melatonin itu sendiri,” kata Leonardo.

Mempraktikkan *sleep-hygiene* adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu tidur yang lebih berkualitas. Penggunaan suplemen dan obat-obatan tertentu harus dalam pengawasan dokter untuk menghindari terjadinya efek yang merugikan. Selain itu, pendekatan psikoterapi oleh tenaga kesehatan profesional jiwa juga saat ini banyak dilakukan untuk membantu seseorang dengan gangguan tidur.



OPTIMALKAN DIGITALISASI, BPJS KESEHATAN RAIH DUA PENGHARGAAN DI ASIAN TECHNOLOGY EXCELLENCE AWARDS



Bangkok – BPJS Kesehatan kembali berhasil meraih dua penghargaan bergengsi pada ajang the Asian Technology Excellence Awards 2024, Kamis (05/09). Pencapaian yang didapat ini membuktikan BPJS Kesehatan terus memanfaatkan teknologi dalam mengoptimalkan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penghargaan pertama yang diterima adalah Indonesia Technology Excellence Award for Information Management – Healthcare for i-Care JKN - Indonesia National Health Insurance Program Electronic Health Record Retrieval System. Penghargaan ini diberikan atas pengembangan i-Care JKN, yang dinilai berhasil dalam memudahkan pelayanan kesehatan bagi para tenaga medis memberikan pelayanan yang mudah dan cepat berdasarkan riwayat pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui i-Care JKN, tenaga medis dapat mengakses informasi kesehatan secara *real-time*, membantu mereka dalam merencanakan dan memberikan pengobatan yang lebih tepat dan efisien.

"Penghargaan ini membuktikan bahwa sistem informasi jaminan kesehatan kami tidak hanya efektif, tetapi juga berstandar internasional. i-Care JKN memungkinkan tenaga medis untuk memperoleh data yang akurat dan terkini, yang sangat penting dalam pengambilan keputusan medis yang nantinya diberikan kepada peserta JKN," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti yang juga didampingi oleh Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Ariatiawan.

Penghargaan kedua yang didapat BPJS Kesehatan adalah Indonesia Technology Excellence Award for Mobile – Healthcare for FIT with Mobile JKN and Teleconsulting with Mobile JKN Healthcare, yang diberikan atas inovasi Mobile JKN. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung layanan kesehatan berbasis digital dengan berbagai macam fitur layanan yang bisa diakses oleh peserta, termasuk salah satunya konsultasi jarak jauh. Menurutnya, dengan adanya layanan konsultasi jarak jauh di dalam Aplikasi Mobile JKN, peserta yang memiliki keterbatasan akses untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan bisa memanfaatkan fitur ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan genggaman.

"Aplikasi Mobile JKN menjadi salah satu contoh bagaimana teknologi dapat mempermudah akses ke layanan kesehatan. Dengan adanya aplikasi ini, peserta JKN dapat mendapatkan layanan kesehatan yang mudah, salah satunya konsultasi kesehatan tanpa terikat tempat dan waktu," tambah Ghufron.

BPJS KESEHATAN RAIH DUA PENGHARGAAN BERGENGSI DI AJANG TOP GRC AWARDS 2024



Jakarta – BPJS Kesehatan kembali menunjukkan komitmennya dalam tata kelola perusahaan yang baik dengan meraih dua penghargaan dalam ajang TOP GRC (Governance, Risk, and Compliance) Awards 2024. Penghargaan pertama yang diraih adalah TOP GRC Awards 2024 #5 Star, yang merupakan capaian tertinggi atas keberhasilan BPJS Kesehatan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, serta pemanfaatan teknologi digital yang luar biasa.

Penghargaan kedua diberikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti yang mendapat gelar The Most Committed GRC Leader 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan dedikasi tinggi dalam menjalankan serta mengintegrasikan GRC dalam setiap aspek operasional yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam menjalankan Program JKN.

"Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini dan akan terus berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola yang baik demi memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Capaian ini merupakan salah satu indikator keberhasilan BPJS Kesehatan dalam menghadapi tantangan-tantangan GRC. Dengan pemanfaatan teknologi digital yang inovatif, BPJS Kesehatan telah memperkuat tata kelola organisasi, manajemen risiko yang efektif, dan pemenuhan berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku," terang Ghufron saat menghadiri kegiatan TOP GRC Awards 2024.

Ghufron menyebut keberhasilan BPJS Kesehatan dalam mencapai penghargaan #5 Star tidak terlepas dari komitmen kuat untuk menjadikan GRC sebagai inti dari strategi bisnis organisasi. Tanpa dukungan dan komitmen tinggi dari seluruh Duta BPJS Kesehatan, sistem, infrastruktur, dan implementasi GRC yang baik, hal ini tidak akan bisa dicapai. Dirinya mengatakan, melalui TOP GRC Awards, harapannya terjadi peningkatan kesadaran dan komitmen dalam penerapan GRC di seluruh stakeholder.

"BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanannya dan mempertahankan standar keunggulan dalam semua aspek GRC. Prestasi ini tidak hanya menginspirasi sektor kesehatan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi semua stakeholder untuk mengadopsi praktik-praktik GRC yang terbaik, demi memajukan bangsa Indonesia," ucap Ghufron.

UNIVERSAL HEALTH COVERAGE UNTUK INDONESIA

Layanan Kesehatan untuk Semua,
Demi Masa Depan Bangsa





BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Layanan Pengaduan Tatap Muka

Untuk layanan ini, sobat bisa melaporkan pengaduan dengan mendatangi tempat-tempat berikut:

- ✓ Kantor Cabang/Kantor Kabupaten/Kota
- ✓ Mal Pelayanan Publik
- ✓ Mobile Customer Service (BPJS Keliling)
- ✓ Petugas Informasi dan Pengaduan Peserta (PIPP) Rumah Sakit
- ✓ Petugas Informasi dan Pengaduan Peserta (PIPP) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (seperti Puskesmas, klinik pratama, dll)

Layanan Pengaduan Non Tatap Muka

Untuk layanan ini, sobat bisa akses di mana saja dan kapan saja, layanan ini antara lain:

- ✓ Website resmi BPJS Kesehatan di www.bpjs-kesehatan.go.id
- ✓ Mobile JKN, melalui menu "Pengaduan Layanan JKN"
- ✓ Call Center 165
- ✓ Chat Whatsapp Pandawa di 0811 8 165 165
- ✓ Kolom komentar maupun direct message media sosial resmi BPJS Kesehatan, antara lain:
 - ✓ Instagram @bpjskesehatan_id
 - ✓ Youtube @BPJSKesehatan_RI
 - ✓ Twitter @BPJSKesehatanRI
 - ✓ Facebook @BPJSKesehatanRI
 - ✓ Tiktok @bpjskesehatan_id



**ADA KENDALA
KETIKA URUS BPJS
LAPOR KEMANA YA?**